

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TAWURAN OLEH KEPOLISIAN WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

ESTER ULIARTA SIAGIAN

2110112122

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Dr. Ahmad Irzal Rias, S.H., M.H

Diana Arma, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 36/PK-IV/IV/2025

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TAWURAN OLEH KEPOLISIAN WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT

(Ester Uli Arta Siagian, 2110112122, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 71 halaman, 2025)

ABSTRAK

Penegakan hukum sangat penting dalam memberantas kasus tawuran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, dalam hal menangani kasus tawuran masih belum terdapat kejelasan pengaturan tentang tawuran baik dalam KUHP maupun pengaturan lainnya. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian masih belum efektif, salah satunya seperti kasus tawuran yang terjadi di Sumatera Barat. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat untuk menangani kasus tawuran, 2. Bagaimanakah evaluasi kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat dalam menjamin efektivitas penegakan hukum pada kasus tawuran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan melalui penelitian hukum terhadap fakta yang terjadi di kepolisian Polda Sumatera Barat dan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polda Sumatera Barat untuk menangani kasus tawuran dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Salah satu program unggulan sebagai upaya pre-emptif dan preventif dalam menangani kasus tawuran yang terjadi yaitu program Kapolda Sumatera Barat dengan nama Sumbang Zero Tawuran dan Balap Liar. Sedangkan upaya represif yang dilakukan terhadap pelaku tawuran yang tidak menimbulkan tindak pidana hanya membuat surat perjanjian dan dikembalikan kepada orang tua. Sehingga belum adanya efek jera yang dialami oleh pelaku tawuran. Dalam hal upaya represif bagi pelaku tawuran yang menimbulkan tindak pidana menggunakan peraturan yang ada. Sehingga penegakan hukum berupa upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian Polda Sumatera Barat belum efektif karena pengaturan dalam kasus tawuran belum diatur secara tegas dan spesifik. Evaluasi kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat dalam menjamin efektivitas penegakan hukum pada kasus tawuran dengan melakukan pendekatan yang komprehensif pada upaya pre-emptif, preventif dan represif serta mengadopsi kebijakan non penal dan penal. Saran terhadap hasil penelitian adalah disarankan untuk membuat peraturan secara khusus mengenai kasus tawuran oleh pembuat undang-undang dan penulis menyarankan agar pihak kepolisian Polda Sumatera Barat lebih tegas dalam melakukan upaya represif.

Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, Tawuran, Polda Sumatera Barat